

PROSES JURNALISME LINGKUNGAN HIDUP DI SURAT KABAR: STUDI DESKRIPTIF PADA REDAKSI RIAU POS TENTANG PEMBERITAAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2017

Wininda Qusnul Khotimah¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

***ABSTRACT** - Forest and land fire in Riau has been an environmental issue since 1997/1998 until 2017. The reporting about forest and land fire is an environmental issue that becomes main concern of Riau Pos News Paper. Therefore, Riau Pos achieved appreciation from provincial government of Riau as a media that took role in supporting the handling of forest and land fire in 2016. The appreciation could not be separated from the process of environmental journalism as the effort to save the environmental. The main problem of the research was how environmental journalism process in Riau Pos in reporting about forest and land fire in 2017? By qualitative method, this research is presented and analyzed descriptively about reporting process of forest and land fire in Riau pos. The result of the research shows that environmental journalism process of Riau Pos in reporting forest and land fire has not been optimal. The report of forest and land fire was produced without investigation, the report of forest and lane fire just depend on source from government elite that was considered knowing more about forest and land fire rather than directly observing to the field. Description about forest and land fire consequences was still the main topic in framing from journalist and editor. Editing process was just conducted about editorial, to change the title and reduce the numbers of paragraphs in order to suit with the layout, which had been designed by the lay outer. So that the news about forest and lane fire had not complied the principle of environmental journalism.*

Keywords: Process, Environmental Journalism, Forest and Land Fire News, Riau Pos Newspaper.

Pendahuluan

Jurnalisme lingkungan hidup muncul sebagai salah satu perspektif untuk melihat dan melaporkan realitas lingkungan hidup yang ada di sekitar. Jurnalisme ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya untuk penyelamatan lingkungan hidup. Melalui pemberitaan yang memihak kepada upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan. Melalui berita lingkungan yang dimuat dalam pemberitaan, upaya penyelamatan lingkungan bisa dilakukan. Berita lingkungan yang baik akan menghasilkan pengetahuan yang baik pula bagi masyarakat (Sudibyo, 2014). Pada akhir Desember 2016, pemerintah Provinsi Riau memberi penghargaan kepada surat kabar Riau Pos sebagai media yang berperan dan mendukung dalam operasi siaga darurat penanggulangan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2016 (Sumber: Riau Pos edisi Rabu, 28 Desember 2016).

Pemberitaan mengenai karhutla hingga mendapat penghargaan, tentunya tidak terlepas dari bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup yang dilakukan oleh redaksi. Mulai dari peliputan oleh wartawan, penyuntingan oleh redaktur hingga kontrol dari pemimpin redaksi. Proses jurnalisme tersebut tentunya melewati banyak tahapan yang kompleks hingga menjadikan berita karhutla yang baik. Melihat, tidak mudah untuk menyajikan berita lingkungan hidup yang independen juga berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Hal ini dikemukakan oleh Abrar (1993), wartawan lingkungan hidup harus memiliki kewaspadaan terhadap idealisme kerja di perusahaan media tempatnya bekerja. Jurnalis lingkungan hidup ialah wartawan umum yang selama peliputan berita akhirnya memiliki ketertarikan yang kuat untuk memberitakan masalah lingkungan hidup (Abrar, 1993).

Menurut Aristiarini dalam Atmakusumah 1996, peliputan dan penurunan berita lingkungan hidup di surat kabar lebih sering terhambat oleh kendala internal. Artinya, meskipun berita lingkungan hidup tersebut penting bagi pembaca, namun ketika rapat redaksi tidak diputuskan menjadi berita utama, maka berita penting tersebut akan ditempatkan di bagian dalam surat kabar saja. Kendala internal di sini adalah kebijakan redaksional pemberitaan dan juga jika ada campur tangan pihak manajemen terhadap berita lingkungan hidup. Tidak jarang berita lingkungan hidup yang sebenarnya bermanfaat bagi pembaca tidak bisa terbit karena tidak sejalan dengan keinginan organisasi media. Akhirnya wartawan lingkungan berfikir untuk membuat berita lingkungan yang seadanya saja (Abrar, 1993).

Sehingga, penulis melakukan pra-penelitian terlebih dahulu mengenai bagaimana pengalaman mereka membuat berita lingkungan hidup dan dihadapkan dengan media tempat mereka bekerja. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh jurnalis Tempo kontributor Pekanbaru yakni:

...kami jurnalis di Riau ini sampai bosan meliput kasus kebakaran hutan ini karena selalu ada setiap tahun. belum lagi peliputannya yang aksesnya sangat jauh, jadi saya belum pernah meliput secara langsung ke lokasi kejadian. Data yang saya dapat dari Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)...(Ryan Nofitra, wawancara 27 Setember 2016)

Hasil dari wawancara peneliti dengan wartawan Tempo tersebut menggambarkan sedikit banyak proses kerja jurnalis lingkungan di media Riau dalam meliput dan menghasilkan berita tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ternyata dalam praktiknya, menunjukkan bagaimana seorang wartawan yang berada di sekitar kasus lingkungan hidup tidak selalu melakukan peliputan melalui observasi langsung (wawancara *via Whatsapp* 27 September 2016). Pengalaman berbeda tentang liputan kasus karhutla juga didapatkan oleh Didik Hermanto sebagai wartawan Riau Pos. Peliputan kasus karhutla sudah dilakukan sejak tahun 2014 dari menjadi pewarta foto hingga reporter. Didik bercerita bagaimana pengalamannya mendapatkan berita karhutla yang harus terjun ke lokasi dan bagaimana ketika berita karhutla tersebut akan diterbitkan. Beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai berita karhutla yang tidak naik cetak dan sensor yang dilakukan oleh editor. Dalam wawancara langsung yang dilakukan yaitu:

....Kadang Ada, ya itu tadi kaitannya dengan bisnis media, misal kita tau gimana di lapangan nih, kadang karena kepentingan bisnis, kita tuh tidak bisa menyebutkan nama perusahaan yang terlibat ini....(Didik Hermanto, wawancara 4 Januari 2017)

Dari beberapa hasil wawancara pra dan penelitian yang dilakukan, maka bisa dilihat bahwa apa yang menjadi kebijakan redaksional media maka akan mempengaruhi bagaimana berita lingkungan hidup tersebut disajikan untuk pembaca. Sensor narasumber penyajikan berita lingkungan hidup masih tergantung pada kepentingan dari perusahaan media. Praktik jurnalisme lingkungan menurut Abrar (1993), memberlakukan sensor akan menguntungkan satu pihak, dan pihak yang diuntungkan sebenarnya haruslah pembaca. Sebab, penghargaan pemerintah Riau dijatuhkan kepada Riau Pos sebagai media yang dianggap peduli untuk penanganan kasus karhutla. Karena, terdapat asumsi awal bahwa proses jurnalisme lingkungan hidup yang diterapkan masih terkendala oleh praktik yang dilakukan oleh jurnalisnya juga adanya kendali besar kepentingan redaksi dan manajemen surat kabar tersebut.

Kajian Pustaka

Jurnalisme Lingkungan Hidup di Surat Kabar

Akar dari jurnalisme lingkungan adalah komunikasi lingkungan, yang mengkaji bagaimana individu, lembaga, masyarakat serta budaya menerima, memahami, membentuk, menyampaikan dan menggunakan pesan tentang lingkungan itu sendiri, serta hubungan timbal-balik antara manusia dengan lingkungan (Cox, 2010). Pada prinsipnya pengertian jurnalisme lingkungan hidup tentu tidak lepas dari definisi jurnalisme yang baku. Jurnalisme lingkungan, meskipun diakui sebagai ‘spesialisasi’ baru, tetaplah jurnalisme yang bertolak dari aturan, norma, dan etika baku di dalam jurnalistik. Hal serupa dituliskan oleh Patel (2006) dalam jurnalnya yaitu : “...*environmental journalism is more about how people affect the environment and how the environment affects people, about feedback loops of environmental damage..*”, dimana dalam tulisannya Patel bercerita begitu berpengaruhnya perlakuan manusia terhadap lingkungan dan begitu sebaliknya, yang menjadi perhatian utama Patel ialah bagaimana sumberdaya yang rusak benar-benar mempengaruhi keadaan ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, budaya dari suatu Negara.

Olehnya, jurnalisme lingkungan hidup memiliki tujuan untuk memberikan pencerahan, informasi sekaligus edukasi mengenai kesadaran pentingnya lingkungan, persoalan lingkungan hingga tata cara perbaikan lingkungan yang rusak. Jurnalisme lingkungan hidup dalam praktiknya memiliki beberapa tujuan antara lain (Sudibyo, 2014: 8): (a) Membantu masyarakat untuk mendapatkan kesadaran sosial atas apa yang sedang terjadi terhadap lingkungan mereka, (b) Membantu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai untuk memutuskan sikap, (c) Menggerakkan masyarakat untuk terlibat dan bertindak dalam pelestarian lingkungan hidup, (d) Menekan pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan informasi lingkungan hidup sebagai landasan tindakan dan kebijakan yang di ambil, (e) Memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR tentang pelestarian lingkungan atau pengendalian praktik-praktik yang merusak lingkungan.

Sebuah berita tercipta melalui mekanisme kerja yang cukup rumit. Tidak terkecuali berita mengenai kasus lingkungan hidup, yang memiliki perspektif dan pengetahuan khusus dalam peliputannya. Proses pembuatan berita haruslah melalui ruang pemberitaan atau *news room*. Dimana ruang pemberitaan menjadi tempat penyemaian dari suatu informasi di lapangan hingga menjadi berita yang muncul dalam halaman surat kabar. Ruang pemberitaan merupakan tanggung jawab dari bagian redaksional, yang dipimpin

oleh seorang pemimpin redaksi yang bertanggung jawab terkait dengan perencanaan berita hingga pelaporan berita (Santana, 2005).

Menurut pandangan Conrad C. Fink (1998), manajemen redaksi untuk memproduksi materi pemberitaan : (1) *Planning in the Newsroom* : Secara garis besar, *planning in the newsroom* menekankan pada *planning effective of human resources, planning journalistic tone and the drive for quality*. Dalam koridor ini aspek yang harus diperhatikan adalah: *Planning Checklist for Quality* yaitu sebagai daftar kerja dan elemen-elemen yang perlu diperhatikan pemimpin redaksi sebagai pemegang tertinggi dalam upaya menjamin kualitas jurnalistiknya, *Plan to Follow Readership* yaitu kebutuhan informasi pembaca memiliki dinamika luar biasa maka media harus mampu mengikuti dan menyediakannya, *Plan "Showcase" Improvement*. *Showcase* adalah elemen penting pada tampilan surat kabar yang perlu diperhatikan agar dapat menampakkan kekuatan berita. Misalnya, pada *front page* memuat *the day's best news* dengan tampilan *eye-catching* untuk menarik pembaca. (2) *Evaluation the News Product* : Evaluasi merupakan aktivitas rutin bagi media, terlebih pada media harian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Aspek terpenting pada tahap ini adalah melihat proses dalam hasil kerja redaksi secara keseluruhan. Apakah pembaca tercukupi kebutuhan informasi atas berita (*news*) yang disajikan. Dalam Produksi di ruang pemberitaan (*news room*) tidak terlepas dari beberapa pengaruh baik internal maupun eksternal. Reese dan Shoemaker dalam Ishadi SK (2001), bahwa proses dinamika di sebuah ruang pemberitaan melalui sejumlah pengaruh yaitu:

(a) *Individual Level* : Pada level ini para wartawan yang berperan dalam menentukan agenda berita, karena mereka langsung berhubungan dengan sumber berita. Dalam merekonstruksi peristiwa sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, penalaran dan batas-batas tertentu berdasar pada persepsi subyektifnya. (b) *Media routine level* : Level ini adalah praktik media di mana keputusan dan persepsi mengenai peristiwa yang dibawa ke ruang pemberitaan dipengaruhi oleh cara para profesional media di perusahaan tempat mereka bekerja dalam mengorganisasi sistem kerjanya. (c) *Organizational Level* : Di samping level rutinitas media, organisasi juga terlibat dalam proses rekonstruksi berita dan peristiwa. (d) *External Media Level* : Level media eksternal berarti faktor-faktor di luar media bisa memengaruhi isi media. (e) *Ideology Level* : Level ideologi ini berkaitan dengan struktur kekuasaan dalam arti sejauhmana kekuasaan melalui berbagai peraturan yang ditetapkan mampu berpengaruh atas proses pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan.

Proses pemberitaan berita lingkungan hidup di surat kabar tidak berbeda dengan tahapan pada media lainnya. Tahapan proses pemberitaan tersebut meliputi perencanaan (*news planning*), pengumpulan (*news gathering*), penulisan (*news writing*), penyuntingan (*news editing*), dan publikasi (*news publishing*) (Rolnicki *et al*, 2015).

1) Tahap *Planning* : Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bagaimana Conrad C Fink menjelaskan tahapan ini untuk menentukan informasi yang dibutuhkan pembaca dan juga membuat berita menjadi lebih menarik. Fink (1998) juga menjelaskan perlunya evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja dengan melihat berita yang disajikan apakah sudah mencukupi kebutuhan pembaca ataukah belum. Tahapan ini biasanya dilakukan dengan rapat redaksi, biasa disebut dengan rapat proyeksi atau rapat *budgeting*.

- 2) Tahap *News Gathering* : Tahapan ini meliputi pencarian data atau informasi dari suatu kejadian lingkungan hidup, sebelum di tulis menjadi sebuah berita. Proses peliputan atau pengumpulan fakta oleh wartawan menurut Itule dan Anderson (1987), ditentukan berdasarkan pada tugas umum, sistem *beat*, dan liputan khusus. Liputan khusus memungkinkan seorang wartawan lingkungan melakukan peliputan yang lebih dalam dari yang lainnya. Seorang wartawan yang melakukan peliputan mengenai permasalahan lingkungan hidup haruslah paham dengan apa yang dituliskannya dengan mengumpulkan fakta di lapangan (Itule & Anderson, 1987). Teknik mengumpulkan fakta sebagaimana dalam Abrar (2005) ialah observasi, wawancara, konferensi pers, Studi literatur (riset), dan *press release*. Menurut Ermanto (2005), hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan berita lingkungan hidup ialah, sudut pandang, keakuratan data, konsekuensi pemberitaan, dan kode etik jurnalistik.
- 3) Tahap *News Writing* : Berita lingkungan hidup haruslah mampu disampaikan dengan tulisan yang mudah di pahami dan memperkaya batin (Abrar, 1993). Hal tersebut, dapat dilakukan jurnalis lingkungan hidup dengan cara : tidak menggunakan kata-kata yang susah untuk dipahami, hati-hati dengan penggunaan istilah ekologi atau istilah rumit lainnya, menguraikan proses kimia, fisika, dan biologi sesederhana mungkin, tidak banyak menggunakan angka dan grafik, memakai tulisan yang luwes dan tidak melompat-lompat, (Amor *et al*, 1988 dalam Abrar, 1993). Penulisan berita lingkungan tidak berbeda dengan berita lain, pada umumnya penulisan berita harus tetap memenuhi unsur 5 W+ 1 H, berita juga tetap ditulis berdasarkan piramida terbalik (Rolnicki, dkk, 2015:53).
- 4) Tahap *News Editing* : Tahapan ini dilakukan oleh redaktur atau *copy editor*, yang seharusnya dalam *editing* berita lingkungan seharusnya meminimalkan sensor dan menyederhanakan penyajian berita (Abrar, 1993). Tahap ini bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap berita-berita yang ditulis oleh wartawan. Pengecekan faktanya meliputi angka, tanggal dan waktu, verifikasi fakta, hilangkan fakta yang meragukan, keringkasan berita. Proses ini nantinya menentukan *headlines* berita dalam surat kabar, *headline* bertujuan untuk menggambarkan isi berita secara cepat dan menarik pembaca melalui *headline* tersebut (Garst & Bernstein, 1982:91).
- 5) Tahap *News Publishing* : Tahapan ini di lakukan oleh pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana, berita yang telah di edit harus mendapat persetujuan pemimpin redaksi, barulah redaktur pelaksana menyajikan berita tersebut dan menyerahkannya kebagian layout dan percetakan (Djuroto, 2002). Tahapan ini sebenarnya melibatkan banyak pihak, mulai dari editor naskah juga editor fotografer, bersama desainer untuk membahas presentasi visual yang menarik. Aspeknya meliputi jumlah halaman, desain grafis, foto yang menarik dengan *caption* yang jelas dan menarik (Rolnicki, dkk 2015: 275).

Metode Penelitian

Metode kualitatif dengan penyajian deskriptif menurut Moleong (2001) merupakan metode yang digunakan untuk menemukan fakta dan melakukan interpretasi, menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu. Studi deskriptif dipilih sebagai alat untuk membuktikan asumsi sementara atau hipotesis penelitian. Studi deskriptif sengaja dipilih untuk mengamati fenomenologi yang terjadi

dalam praktik jurnalisme lingkungan hidup. Sebab, format deskriptif akan tepat jika digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam (Bungin, 2008:69). Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung di kantor Graha Pena Riau Pos, Riau. Dengan wawancara mendalam kepada tujuh orang wartawan yang meliput karhutla, lima orang penanggung jawab di redaksi, dan satu orang koordinator LSM Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (jikalahari).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dari pengamatan proses *news planning, news gathering, news writing, editing, hingga publishing* sesuai dengan kerangka operasional diikuti berdasarkan empat berita yang diikuti proses jurnalisme lingkungannya. Berita tersebut adalah (1) Tahun Ini Restorasi Gambut 400 Ribu Ha, 12 Januari 2017 (2) Pangdam Siap Kirim Pasukan, berita 12 Januari 2017 (3) Pesawat Tempur Pantau *Hotspot*, berita 13 Januari 2017, dan (4) Waspada Sebelum Membara, berita 15 Januari 2017.

Proses jurnalisme lingkungan hidup dalam pemberitaan karhutla yang dilakukan oleh wartawan Riau Pos dalam peliputan sebenarnya sedikit banyak mendapat pengaruh dari tingkat pengetahuan dan latar belakang akan persoalan lingkungan hidup. Menurut Shoemaker dan Reese (1996) dalam level individu, para wartawan akan berhubungan langsung dengan realitas yang ditemuinya di lapangan. Sebagaimana berita karhutla yang tersaji di media adalah hasil konstruksi yang dibentuk secara subyektif oleh wartawan itu sendiri. Dalam tingkatan ini individu wartawan Riau Pos yang melakukan peliputan karhutla sebagian besar adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan lingkungan hidup maupun bergabung pada organisasi lingkungan hidup. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh M. Fathra Nazrul Islam yang tidak begitu tertarik meliput permasalahan lingkungan hidup, kemudian Agustiar, Eka Gusmadi Putra, M.Ali Nurman, dan Didik Hermanto yang juga tidak memiliki organisasi atau latar belakang yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tetapi, latar belakang pendidikan jurnalistik menjadi bekal utama mereka sebagai jurnalis di Riau Pos dan juga terlibat dalam penulisan berita-berita karhutla.

Wartawan yang memiliki pengetahuan lingkungan hidup hanyalah Mario Kisaz yang memang ditugaskan pada peliputan *desk* lingkungan hidup atau yang disebut dengan *for-us*.¹ Pengalaman tersebut ternyata disetujui oleh koordinator Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau). Menurutnya, dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan penalaran yang kurang berperspektif lingkungan hal tersebut menjadikan pemberitaan yang dibuatpun terkesan dangkal.

Rutinitas media juga menjadi faktor penentu akan bagaimana berita karhutla yang dihasilkan. Pada level ini, peran penting dibawa oleh editor dan juga redaktur pelaksana bagaimana mengemas isu karhutla yang akan disajikan. Dalam hal ini seperti pada ulasan sub bab sebelumnya, bagaimana proses editing yang dilakukan oleh editor Riau Pos ternyata hanya pada level perubahan judul dan meminimalkan jumlah kata agar tidak mengambil jumlah halaman iklan yang sudah disiapkan. Rutinitas media yang seperti itu berpengaruh juga kepada bagaimana para jurnalis yang bertugas meliput kasus karhutla. Dari hasil penelusuran yang dilakukan peneliti selama mengikuti peliputan bersama

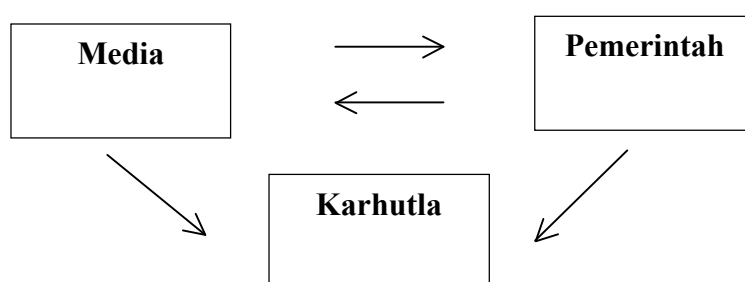
¹ Hasil wawancara dengan para wartawan Riau Pos Januari 2017

wartawan Riau Pos, peliputan yang dilakukan bukan ternyata sangat dimudahkan dengan adanya *e-mail* dan *mobile phone*. Dengan kecanggihan teknologi yang ada sangat memudahkan para wartawan untuk menjadikan persoalan karhutla menjadi sangat sederhana.

Dari pengamatan, ditemukan bahwa para wartawan mendapat data peliputan hanya dengan menunggu *email* yang dikirim dari wartawan lain juga bertugas pada posko yang sama. Dengan begitu, praktik jurnalisme lingkungan yang dilakukan tidak harus melalui wawancara langsung dengan narasumber, mengikuti konferensi pers, apalagi sampai observasi langsung ke lapangan itu menjadi hal yang sangat sulit. Seperti yang dikatakan oleh Desriandi koordinator liputan, bahwa kasus karhutla akan benar-benar mendapat perhatian baik dari segi peliputan maupun penyajiannya dalam surat kabar ketika karhutla sudah menimbulkan kabut asap dan dampak yang tidak dalam kelas lokal lagi.

Jurnalis Riau Pos rupanya menjalankan tugas peliputan dengan memposisikan diri sebagai pelaku media. Ketika menjadi pelaku media, maka tujuan utama peliputan berita karhutla yang dilakukan adalah membuat berita karhutla sebagai komoditas atau sebuah produk yang akan dikonsumsi. Menurut Ana Nadhya Abrar Jurnalis sebagai pelaku media akan melakukan fungsi utama yang akan berorientasi dengan kepentingan medianya, yaitu melihat khalayak sebagai konsumen untuk komoditas produknya. Sedangkan, di posisi lain seorang jurnalis juga harus menjalankan fungsi sosialnya sebagai tanggung jawab secara tidak tertulis kepada khalayak atau publiknya. Fungsi yang dijalankan, akan menentukan bagaimana berita lingkungan yang dihasilkan (Abrar, 2015).

Jurnalis Riau Pos memproduksi berita karhutla berdasarkan apa yang menjadi kepentingan redaksi, sebab akan sulit memberitakan tentang karhutla ketika hal tersebut tidak dianggap layak dan penting untuk diberitakan oleh redaksi. Jika peneliti melihat proses pemberitaan karhutla, maka peneliti menemukan pola yang mempengaruhi produksi berita karhutla di Riau Pos yaitu:



Bagan 1. Pola interaksi pemberitaan karhutla di Riau Pos

(Sumber: anlisa peneliti)

Dalam pola ini menggambarkan bagaimana adanya hubungan saling menguntungkan antara kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap aksi yang dilakukan oleh pemerintah tentang kasus karhutla. Pola ini juga menunjukkan bagaimana Riau Pos menjadi satu-satunya media yang mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Riau atas peran serta dalam mendukung operasi siaga dalam penanggulangan bencana asap akibat karhutla pada 2016 (sumber:Riau Pos).

Tidak heran jika sumber elit merupakan sumber primer bagi para jurnalis dalam menulis berita karhutla. Button juga cenderung melihat bahwa media tergantung pada pernyataan resmi dan ahli yang hal tersebut untuk membedakan antara pengetahuan

profesional dan awam (Button, 2002). Praktik jurnalisme lingkungan yang dilakukan Riau Pos berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayan Sakti Suryandaru (2015) pada wartawan Madura di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa wartawan Madura banyak menggunakan sumber data observasi dengan resiko besar yang menghasilkan data mentah. Sehingga berita yang dihasilkan juga terpaku pada data deskriptif yang menjelaskan dampak dari konflik migas di Madura.

Media Riau Pos berbeda, sumber data utama ialah yang berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh sumber terpercaya menurut mereka. Sumber terpercaya adalah mereka yang memberi informasi terlebih dulu, tidak lain adalah elit pemerintahan. Tidak etis memang ketika kasus karhutla hanya bercerita soal realitas di lapangan tanpa ada kutipan dari elit birokrasi atau narasumber yang memiliki kredibilitas tinggi. Namun, yang ada selama pada pemberitaan di Riau Pos ialah bagaimana narasi dari sumber yang memiliki kredibilitas tersebut kemudian disajikan secara mentah juga, tanpa adanya analisis dan sintesis yang sesuai dengan jurnalisme lingkungan seharusnya. Jurnalis dan organisasi mediana menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari persoalan karhutla tersebut. Karena miskin data dan tidak ada riset yang mendalam sehingga kritisisme dan ketajaman menganalisis suatu permasalahan lingkungan hidup tidak konsisten. Ada beberapa kemungkinan lagi mengapa jurnalis dan media cenderung mengerjakan persoalan lingkungan sama halnya dengan menggarap berita populer lainnya dan terkesan asal ada berita. Yaitu, persoalan kompensasi atau penghargaan yang diberikan oleh media kepada para pekerjanya.

Jika dalam media tidak bisa memberi perhatian pada persoalan lingkungan, paling tidak pemberitaan yang dilakukan oleh media harus ada unsur advokasi yang memihak kepada keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut seperti yang dituliskan oleh Sudibyo sebagaimana tujuan dari jurnalisme lingkungan itu sendiri yaitu: (a) Membantu masyarakat untuk mendapatkan kesadaran sosial atas apa yang sedang terjadi terhadap lingkungan mereka, (b) Membantu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai untuk memutuskan sikap, (c) Menggerakkan masyarakat untuk terlibat dan bertindak dalam pelestarian lingkungan hidup, lingkungan (Sudibyo, 2014).

Kesimpulan

Pada proses perencanaan (*planning*) di ruang redaksi, isu karhutla tidak selamanya akan menjadi *listing* atau daftar tema yang harus diliput. Seperti temuan peneliti bahwa beberapa wartawan melakukan peliputan karhutla bukan berasal dari penugasan. Hal tersebut tidak didukung dengan *skill* mengumpulkan dan mengolah data. Jurnalis Riau Pos tidak ada yang melakukan riset terlebih dahulu ketika melakukan peliputan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber saja. Pencarian informasi (*news gathering*) oleh wartawan utamanya mengandalkan pendapat para elit atau pejabat daerah seperti komandan militer dan Panglima kodam. Pemilihan narasumber mengindikasikan kepekaan yang lebih mengenai persoalan karhutla.

Narasumber elitis dianggap sebagai sumber yang lebih memiliki keabsahan dalam pendapatnya untuk diberitakan. Kemudian, secara teknis penulisan berita lingkungan hidup yang dilakukan menunjukkan adanya kesepakatan mengenai kelengkapan 5w+1h, nilai berita seperti *proximity*, aktualitas, konsekuensi, konflik, dan *human interest*. Sandaran objektivitas dan verifikasi akan fakta juga dipenuhi dalam penulisan berita karhutla.

Penyuntingan berita hanya perihal redaksional, untuk mengganti judul dan pengurangan jumlah paragraf agar sesuai dengan *layout* yang sudah dirancang oleh halaman perwajahan. Sedangkan, untuk perihal substantif tidak ada yang berubah sedikitpun dari berita awal hingga berita naik cetak, hingga pada proses evaluasi diketahui bahwa berita yang naik cetak sama sekali tidak membahas kejadian detail di lokasi kebakaran. Kelemahan *editing* tersebut diidentifikasi oleh peneliti sebagai sebuah kendala dari proses produksi berita lingkungan yang dilakukan oleh Riau Pos. Praktiknya, proses peliputan dan publikasi berita lingkungan yang secara deskriptif masih menjadi kebiasaan umum dalam praktik di Riau Pos. Berita-berita dangkal dan minim analisa masih lebih sering diterapkan dalam penulisan dan penyuntingannya. Selama penelitian ini berlangsung, tidak ada proyeksi khusus mengenai editorial atau tajuk tentang kasus karhutla dari Riau Pos. Dari sini dapat dijadikan indikasi konfirmatif bahwa kurangnya perhatian media akan kasus lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Abrar, A. N. (1993). *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- . (1995). *Mengurai Permasalahan Jurnalisme*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- . (2005). *Penulisan Berita*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- . (2005). *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. (2015). *Tata Kelola Jurnalisme Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. (1992). *Pers Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Button, G.V. (1999). *The Negotiation of Disaster: the Media Response to Oil Spills in Great Britain*, dalam A Oliver Smith & S.M Hoffman (Eds), *The Angry Earth. Disaster in Anthropological Perspective*, New York and London: Routledge.
- Cox, R. (2010). *Environmental Communication And The Public Sphere* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Ermanto. (2005). *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional*. Yogyakarta : Cinta Pena
- Fink, C. C. (1998). *Strategic Newspaper Management*. New York : Random House.
- Garst, R. E. & Bernstein, T. M. (1982). *Headlines and Deadlines*. New York: Columbia University.
- Itule, Bruce., & Anderson, D. A. (1987). *News Writing And Reporting for Today's Media*. New York: Random House
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : P.T Rosda Karya
- Rolnicki, T. E., Tate, C. D., & Taylor, S. A. (2015). *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)*. Edited by Tri Wibowo. Jakarta: Kencana.
- Santana, S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Ishadi, S. K. (2001). *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta : Penerbit Kompas.
- Sudibyo, A. (2014). *34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan*. Jakarta : Gramedia
- Samir, S. P. (2006). 'Islands of understanding': *Environmental journalism in the South Pacific*. *Environmental Journalist*, New York

Khotimah

Shindawani, T. N. (1979). *Newspaper Economics and Management*. New Delhi : Ankur Publishing House.

Suryandaru, Y. S. (2015). *Jurnalisme Isu Eksplorasi Migas di Madura; Analisis dengan pendekatan Ekonomi - Politik Media*. Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana UGM.